

SINERGISITAS (EKSEKUTIF, LEGISLATIF, JUDIKATIF SERTA MASYARAKAT) DALAM MENGENTAS PERMISIF DEVIASI DI KOTA MANADO

Benedicta J.Mokalu

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sam Ratulangi

Email: benedictamokalu@yahoo.co.id

ABSTRAK

Masyarakat kota Manado pluralis dalam suku bangsa, agama dan keyakinan dikenal sebagai kota “religius” (kehadiran banyak rumah ibadah dari semua golongan agama yang diakui di Indonesia). Harmonisasi hidup rukun dan damai (tidak pernah terjadi konflik akar rumput), sekalipun Manado diapit oleh daerah berpotensi konflik, yakni di sebelah Utara dengan Mindanao Pilipina, Selatan dengan Poso dan Timur dengan Maluku Utara. Semua warga kota Manado dengan penuh keyakinan sudah siap bergerak maju mengikuti irama arus modernisasi dan pasar bebas. Namun, buah dari politik globalisasi yang ditandai dengan kekerasan, konflik secara bertahap berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat kota Manado. Akhir-akhir ini kota Manado menjadi tidak aman, sikap permisif fandalistik (membiarkan tindakan kekerasan dengan penghancuran) sering terjadi dalam bentuk tawuran antar kampung (tarkam). Dalam berpolitik dan berkeyakinan ditemukan rupa-rupa upaya menguasai orang atau kelompok lain (manipulasi kekuasaan) secara berlebihan, sekalipun harus merusak/menghancurkan tatanan sosial yang berlaku (deviasi). Tulisan ini mengacu pada penelitian Benedicta J.Mokalu 2013 tentang Studi Penanganan Pengentasan Kemiskinan dan Prostitusi di Kota Manado Sulawesi Utara. Oleh karena itu, dibutuhkan keberanian mengoptimalkan peranan semua stakeholders (Eksekutif, Legislatif, Judikatif serta Masyarakat) dalam membangun kota Manado yang berbudaya, beretika, tertib, harmonis, sejahtera, cerdas serta beradab (reformasi) guna menangkal permisif deviasi fandalistik.

Kata Kunci: Sinergisitas stakeholders perekat harmonisasi sosial

PENDAHULUAN

Dahulu nama Manado adalah Wenang merupakan bagian dari Kabupaten Minahasa. Menurut Prof. Geraldine Manoppo-Watupongoh, sekitar tahun 1682 orang Spanyol yang mengubah Wenang menjadi Manado. Kata Manado diambil dari nama sebuah pulau di sebelah Bunaken, yaitu pulau Manado. Guna melestarikan nilai historis, maka di belakang pulau Manado ditambahkan kata Tua, sehingga menjadi Manado Tua.

Sekitar abad ke-13 pernah berdiri kerajaan Bowontehu. Ketika kerajaan Bowontehu lenyap pada tahun 1500-1678 berdiri kerajaan Manado.

Kini masyarakat kota Manado pluralis suku, agama dan ras yang diwakili dengan penyebutan nama kampung, yakni; kampung Cina, kampung Arab, kampung Islam, kampung Ternate, Liwas (lingkungan warga Sangihe), kampung Tondano, kampung Tomohon, kampung Kakas, kampung Tombariri. Keberadaan kampung-kampung ini telah memperkaya pluralitas dalam hal toleransi, harmonisasi sosial menyongsong persaingan pasar bebas.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota Manado berawal pada akhir tahun 1980 hingga tahun 1993, ketika pantai Manado direklamasi. Reklamasi pantai Manado selama 13 tahun dan diresmikan penggunaan sebagai pusat kegiatan bisnis pada tahun 1995. Panjang pantai yang direklamasi sama dengan panjang jalan, yaitu 4,3 km, dengan lebar antara 100-150 meter. Luas wilayah pantai yang direklamasi 67 Ha. Jalan di kawasan reklamasi diberi nama Pierre Tendean atau masyarakat menyebut Boulevard. Hingga kini di tahun 2015 sepanjang kawasan reklamasi telah disulap menjadi pusat bisnis. Hal ini menegaskan masyarakat kota Manado sudah siap menyongsong modernisasi dan globalisasi juga MEA 2015. Fenomena ini ditunjang oleh pertumbuhan ekonomi sekitar 7% tahun 2014. Kesiapan Manado tercermin dari kehadiran hotel-hotel berbintang dan penginapan sebanyak 95, Mall, Restoran, Cafe dan Panti pijat sekitar 60 -an.

Modernisasi dan globalisasi telah menerjang sendi-sendi norma kehidupan sosial masyarakat Manado. Fenomena umum, yakni bertumbuh subur mentalitas tidak konsisten, berubah-ubah, sulit dipercaya, mau cari untung dengan mengabaikan norma hukum, sedikit memberi tapi mau meraih keuntungan berlimpah. Godaan kenikmatan mendorong masyarakat kota Manado cenderung lebih memilih hal-hal praktis, tidak mau terikat dengan banyak aturan, bahkan berani mengabaikan aturan yang dianggap menghalang. Contoh: larangan peredaran “cap tikus” (minuman alkohol tradisional), kenyataan cap tikus masih bisa ditemukan di mana saja bahkan masih banyak korban akibat meneguk Cap Tikus. Pengedar narkoba dihukum mati, kenyataan muncul pengedar narkoba baru lebih nekat. Tarkam paneh wayer ditangkap bahkan beberapa orang ditembak, namun masih tetap saja terjadi tarkam. Koruptor dihukum berat, namun tetap saja bertumbuh subur tidak berkurang bahkan lebih nekat. Hampir semua orang

sudah mengetahui risiko dari seks bebas akan terjangkitnya penyakit HIV/AIDS, namun kenyataan masih banyak orang doyan pelacur bahkan praktik pelacuran bertumbuh subur.

Kompleksitas masalah yang menerpa masyarakat kota Manado cenderung bertentangan dengan nilai-nilai budaya. Hampir semua anak-anak juga sebagian besar orang dewasa di kota Manado tidak mengerti bahasa ibu (asal suku) serta nilai-nilai budaya warisan leluhur. *Sitou timou tomou tou* masih dikenal tetapi nilai-nilai yang terkandung diabaikan. Misalnya: semangat memberi, semangat berkorban, tolong-menolong tanpa pamrih, telah berada dalam titik kritis, sudah kehilangan daya magis, kurang punya roh, hanya sekedar basa-basi. Diganti dengan materialisme, individualisme, liberalisme, hedonisme (kenikmatan), kepentingan diri sendiri serta kepentingan kelompok. Akibatnya, bertumbuh subur perilaku menyimpang, seperti: bangga melanggar hukum, kurang sikap kritis, kurang jujur, kurang mengakui dan menghargai kelebihan orang lain, kurang punya etos kerja, kurang punya rasa malu mencuri, korupsi, nepotisme, membunuh untuk alasan-alasan sepele, prostitusi, psikotropika (deviasi sosial), dll.

Tujuan yang hendak dicapai dari tulisan ini agar masyarakat kota Manado sadar dan mengerti bahwa menjaga citra baik kota Manado mutlak adanya sehingga berani menolak semua bentuk tindakan anarkis yang bertentangan dengan harmonisasi. Oleh karena itu, Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif harus sinergis bersama dengan masyarakat dalam menegakkan aturan sesuai semangat reformasi yakni mengedepankan kebenaran, keadilan, profesionalitas, kapabilitas, bukannya hanya berdasarkan pada “cita rasa subyektivitas” dan transaksional (nepotisme, koncoisme, dan isme-isme lainnya).

Pendekatan fenomenologi dipakai sesuai dengan pandangan Edmund Husserl yang meyakini bahwa sesungguhnya obyek ilmu itu tidak terbatas pada hal-hal yang empirik (sensual, terindra), tetapi juga mencakup fenomena yang berada di luar itu seperti persepsi, pemikiran, kemauan dan keyakinan subyek tentang “sesuatu” di luar dirinya. Pengolahan data, analisis data menggunakan Miles dan Hubermans, 1992. Kajian ini melalui obserasi, wawancara acak sekitar reaksi masyarakat kota Manado terhadap rupa-rupa tindakan kekerasan, penegakkan aturan serta standar penempatan jabatan yang dilakukan selama ini.¹

¹ Muhamad Idrus, 2007: 79, 179-181. Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif). UII Press.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat kota Manado pluralis suku, ras, agama, strata sosial ekonomi, serta tingkat pendidikan. Beberapa tahun terakhir diakui sebagai kota percontohan toleransi terbaik di negeri ini. Citra positif yang telah ditorehkan mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat guna menyelenggarakan acara bertaraf nasional juga internasional. Seperti kota – kota modern lain, masyarakat kota Manado diperhadapkan dengan godaan globalisasi. Oleh karena itu, harus cerdas membaca tanda-tanda zaman sehingga terhindar dari degradasi nilai, persaingan serta konflik sebagai pemicu harmonisasi sosial.

Analisis hasil penelitian ini menemukan masyarakat kota Manado berada dalam proses transisi jebakan globalisasi, seperti dijelaskan berikut.

- 1. Permisif sistemik fandalistik (kekerasan) yang ditandai usaha menguasai orang atau kelompok lain dan lingkungan (manipulasi kekuasaan) secara berlebihan, sekalipun harus merusak/menghancurkan tatanan sosial yang berlaku (deviasi).**

Kota Manado beberapa tahun terakhir sangat tidak aman, sangat berbahaya, sering terjadi tindakan kekerasan kolektif yang dikenal dengan Tarkam (tawuran antar kampung). Tarkam menjadi momok menakutkan karena kejadian selalu secara tiba-tiba, siapa saja bisa menjadi korban. Suasana ketidakpastian dan mencekam ini menimbulkan perasaan takut untuk melakukan kegiatan di luar rumah. “Apakah tarkam mencerminkan karakter masyarakat kota Manado dalam menyelesaikan masalah?”

“Tren tindakan kekerasan di kota Manado beberapa tahun terakhir terdiri dari dua pola, yakni dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara tertutup. Pola kekerasan secara terbuka dalam bentuk tawuran antar kampung (tarkam). Cara yang dilakukan adalah menyerang secara langsung, berhadap-hadapan dengan menggunakan batu, benda tajam, panah wayer hingga pembakaran. Korban yang ditimbulkan sering salah alamat, meyerempet tanpa arah. Modus operandi, biasanya dilakukan bersama-sama oleh sekelompok orang setelah meneguk “cap tikus.” Adapun motif di antaranya: balas dendam, membela teman atau saudara, tersinggung, membela identitas kelompok, dll.

Sebaliknya, kekerasan secara tertutup selalu berupa tekanan psikologis dan sosiologis kepada seseorang atau sekelompok orang yang memiliki perbedaan

dalam hal aliran politik, aliran keyakinan (agama), persaingan bisnis, persaingan kekuasaan (suka jadi pejabat). Konflik tipe ini jarang terlihat dipermukaan, lebih bersifat masif (gejolak terendap dalam hati). Mereka yang terlibat dalam konflik ini dalam batas waktu tertentu berusaha mengendalikan diri sehingga tidak diketahui orang lain atau kelompok lain. Contoh: Berbeda paham politik secara diam-diam meninggalkan partai politik dan bergabung dengan partai politik lain.

Kekerasan tertutup juga terjadi dalam urusan keyakinan. Jika tidak cermat maka sumber kekerasan dipicu oleh strategi agresifitas sektarian penginjilan dari gereja reformasi atau yang dikenal dengan gereja karismatis. “Mengapa?” Karena telah berhasil membangun fanatisme atas kebenaran (inklusif). Mereka adalah golongan yang paling benar, yang lain salah, kurang dan keliru. Harus diakui bahwa mereka sangat cerdas menawarkan “menu” kepuasan “rohaniah” yakni meninggalkan kebiasaan perilaku beriman tradisional yang dianggap kaku dengan tata cara liturgis (berdoa, duduk, diam, mengantuk, pulang, berdosa). Gereja-gereja karismatis saat ini dipadati orang muda, anak-anak, orang tua dan manula bertumpah ruang bersorak gembira. Domba-domba yang berduit dan berkesuksesan diam-diam meninggalkan gereja-gereja tradisional. Motif dari domba loncat pagar ini karena merasa tidak puas dengan suasana liturgi, berbeda pendapat dengan pimpinan atau berbeda pendapat dengan sesama jemaat. Menurut Skinner bahwa orang-orang yang belum dewasa spiritual dan fisik (usia) selalu mengambil jalan pintas, mau menang sendiri, lari dari masalah alias masih bersifat kekanak-kanakkan, selalu mencari-cari alasan (rasionalisasi), misalnya, mencari suasana baru bertemu dengan Tuhan dalam suasana suka cita, bergembira, melepaskan semua ketegangan. Kalau alasan ini benar maka apa bedanya dengan Karl Max seorang filsuf atheis mengatakan bahwa “agama adalah obat bius – racun jiwa” dan Sigmund Freud dalam psikoanalisa mengatakan *sugesti* mampu melepaskan diri dari semua jenis ketegangan (tidak harus berdoa, tidak harus puji-pujian, tidak harus bersekutu).

Suasana resah merupakan realitas, harus diakui bahwa telah terjadi gejolak saling curiga, perpindahan jemaat hingga menyebarkan fitnah terhadap jemaat lain (gereja lain) sebagai salah, kafir, animisme. “Mengapa penginjilan harus berawal dengan konflik?” Suara samar-samar mengatakan kalau bukan karena uang dan jabatan dalam gereja, lalu alasan apalagi. Hingga kini strategi “pecah belah” sangat berhasil hal ini ditandai dengan bertumbuh subur gereja-gereja baru di kota Manado. Namun, menghimpun jemaat dengan cara membuka kandang tetangga sama saja dengan cari gampang, cari masalah pasti tidak akan mendapatkan domba-domba yang gemuk. Apalagi sikap melarikan diri dari masalah tidak menyelesaikan masalah, justru hanya menunda sementara saja. Semakin didiamkan justru akan menjadi bias nilai, akibatnya berujung pada usaha untuk saling menghancurkan, saling menggoyahkan solidaritas kelompok, menyangkal kelompok, menyangkal saudara hingga saling melakukan tindakan pengancuran (mari belajar dari konflik sektarian di Timur Tengah, belum terlambat).

Studi tentang kekerasan kolektif terbaru menunjukkan pada umumnya kekerasan kolektif muncul dari situasi konkrit yang sebelumnya didahului oleh *sharing* gagasan, nilai, tujuan dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama. Masalah bersama adalah faktor paling penting dan bisa melibatkan perasaan akan bahaya, dendam atau marah. Suatu masalah langsung bisa memicu suatu pemberontakan massa, tetapi harus ada sejarah bersama yang bisa menentukan langkah bersama. Beberapa sosiolog, terutama Charles, Louise, dan Richard Tilly (1975), menekankan pentingnya “mobilisasi politik” yang bisa membuat benih gerakan massa semakin besar dan bisa membuat suatu revolusi lebih berhasil. Akan tetapi, banyak sosiolog lebih menyetujui analisis Ted Robert Gurr (1970) yang menyatakan bahwa individu yang memberontak sebelumnya harus memiliki latar belakang situasi, seperti terjadinya ketidakadilan, munculnya kemarahan moral, dan kemudian memberi respons dengan kemarahan pada sumber penyebab kemarahan tersebut. Selain itu, massa juga harus merasakan situasi konkret dan langsung yang menjadi pendorong ungkapan kemarahan mereka, sehingga mereka bersedia menerima risiko yang berbahaya.²

Deviasi atau penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan/populasi.³ Ciri-ciri tingkah laku yang menyimpang itu bisa dibedakan dengan tegas yaitu: (1) aspek lahiriah, yang bisa kita amati dengan jelas. Aspek ini berupa deviasi lahiriah yang verbal dalam bentuk kata-kata makian, slang, kata-kata kotor yang tidak senonoh dan cabul, sumpah serapah, dll. Deviasi lahiriah yang non verbal; yaitu semua tingkah laku yang nonverbal yang nyata dan kelihatan. (2) Aspek-aspek simbolik yang tersembunyi. Khususnya mencakup sikap-sikap hidup, emosi-emosi, sentimen-sentimen, dan emosi-emosi yang mengembangkan tingkah laku menyimpang.⁴ Kartini Kartono, masalah-masalah sosial pada hakikatnya juga merupakan fungsi-fungsi struktural dari totalitas sistem sosial, yaitu berupa produk atau konsekuensi yang tidak diharapkan dari satu sistem sosial-kultural.⁵

² Thomas Santoso. 2002:15. Teori-teori Kekerasan. Galia Indonesia. Universitas Kristen Petra.

³ Kartini Kartono 1981:11. Patologi Sosial Jilid I. Radja Grafindo Persada jakarta.

⁴ Ibid.P.15-16

⁵ Ibid.P.4-5

Formulasi alternatif untuk melengkapi arti “masalah sosial,” ialah istilah “disorganisasi sosial.” Disorganisasi sosial-kadangkala disebut sebagai disintegrasi sosial – selalu diawali dengan analisis-analisis mengenai perubahan-perubahan dan proses-proses organik. *Teori cultural lag* (kelambanan budaya atau kelambanan kultural) menyatakan sebagai berikut: apabila bermacam-macam bagian dari kebudayaan berkembang secara tidak imbang, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka kebudayaan tadi akan mengalami proses kelambanan kultural (*cultural lag*, kelambanan budaya). Kondisi sosial seperti ini bisa disamakan dengan disorganisasi sosial atau didisintegrasi sosial.⁶

Parsons percaya bahwa ada empat persyaratan mutlak yang harus ada supaya termasuk masyarakat dapat berfungsi. Keempat persyaratan itu disebutnya AGIL. AGIL adalah singkatan dari *Adaptation* (A), *Goal maintenance* (G), *Integration* (I), dan *Latency (pattern maintenance)* (L). Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni:

- Adaptasi (*adaptation*): Supaya masyarakat dapat bertahan dia harus mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan dirinya.
- Pencapaian tujuan (*goal attainment*): Sebuah sistem harus mampu menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan itu.
- Integrasi (*integration*): masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya supaya dia dapat berfungsi secara maksimal.
- Latensi atau pemeliharaan pola-pola yang sudah ada. Setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan membaharui baik motivasi setiap individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi-motivasi itu.

Keempat persyaratan fungsional itu mempunyai hubungan erat dengan keempat sistem tindakan. Sistem organisme biologis dalam sistem tindakan berhubungan dengan fungsi adaptasi, yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan menggerakkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Sistem sosial berhubungan dengan fungsi integrasi dengan

⁶ Ibid. P.179-181

mengontrol komponen-komponen pembentuk masyarakat itu. Akhirnya, sistem kebudayaan berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur-struktur yang ada dengan menyiapkan norma-norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka dalam berbuat sesuatu.⁷

Pada dasarnya pandangan teori konflik tentang masyarakat sebetulnya tidak banyak berbeda dari pandangan teori fungsional struktural karena keduanya sama-sama memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian. Perbedaan antara keduanya terletak dalam asumsi mereka yang berbeda-beda tentang elemen-elemen pembentuk masyarakat itu. Menurut teori fungsionalisme elemen-elemen itu fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa berjalan secara normal. Sedangkan bagi teori konflik, elemen-elemen itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda sehingga mereka berjuang untuk saling mengalahkan satu sama lain guna memperoleh kepentingan sebesar-besarnya.⁸

Menurut Karl Marx, hakikat kenyataan sosial adalah konflik. Konflik adalah satu kenyataan sosial yang bisa ditemukan di mana-mana. Bagi Marx, konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Jenis dari konflik sosial ini bisa bermacam-macam, yakni konflik antara individu, konflik antara kelompok, dan konflik bahkan konflik antara bangsa. Akan tetapi, bentuk konflik yang paling menonjol menurut Marx adalah konflik yang disebabkan oleh cara produksi barang-barang material.⁹

Rule memilah akar perilaku kekerasan menjadi dua, yaitu kekerasan sebagai kalkulasi rasional dan kekerasan irasional. Menurutnya kekerasan sebagai kalkulasi rasional merupakan bagian dari upaya manusia mencapai tujuan. Dengan mengutip Thomas Hobbes, Rule menjelaskan bahwa manusia menyadari dunia adalah tempat yang penuh dengan persaingan dan berbagai manusia yang memperjuangkan tujuan masing-masing. Hobbes menggunakan istilah manusia adalah serigala bagi serigala yang lain (*homo homini lupus*) (Rule 1988). Sedangkan, kekerasan sebagai produk irasional adalah kondisi tercerabutnya perilaku dari tatanan normatif yang sering terjadi dalam situasi kerumunan. *Situasi* kerumunan melahirkan mentalitas kerumunan (*crowd*

⁷ Bernard Raho. 2007:53-54. Teori Sosiologi Modern. Prestasi Pustaka

⁸ Ibid. P.71-72

⁹ Ibid.P.73

mentality) yang mendorong para individu di dalamnya berperilaku liar hewaniah, tanpa kendali dan merebaknya isu-isu yang tidak jelas dalam kerumunan (Rule,1988).¹⁰

Di tengah hiruk-pikuk pergaulan kosmopolitan, persoalan pokok kembali ke manusia sebagai subyek inti. Dalam hubungannya dengan manusia lain konon manusia pada dasarnya itu jahat, penakut, dan emiliki kebebasan mutlak. Dunia manusia dikelola prinsip homo homini lupus, manusia saling menjadi serigala bagi yang lainnya dan *bellum omniom contra omnes*, peperangan semua melawan semua. Demikian menurut Thomas Hobbes dalam Leviathan. Perilaku jahat pada gilirannya melahirkan kekacauan (anarki) di mana-mana, sehingga sebagaiantisipasi dibutuhkan kekuasaan mutlak (*absolute power*), yaitu negara. Gagasan ini kemudian diadopsi para pemikir realis abad 20 (tahun 1940 an-1980-an). Orang-orang seperti Raymond Aaron, Edward Hollet Carr, Stephen Krasner, Hans Morgenthau, dkk, menilai negara sebagai satu-satunya aktor yang paling berdaulat unt uk melakukan hubungan dengan negara lain. Namun menjelang akhir abad 20 para pemikir postrukturalis, seperti Richard Ashley dan Robert B.J.Walker, dan para filsuf posmodern, seperti Jaques Derrinda, Jean Francois Lyotard, dkk justru mengambil posisi bertentangan terhadap pemikiran kaum realis.

Namun demikian, melihat manusia hanya dalam konteks hubungannya dengan manusia lain belumlah cukup untuk memahami siapakah manusia, bagaimana perkembangan karakter dasarnya, terutama berkaitan dengan paradosks perilaku destruktif dan konstruktif. Dalam bahasa Sigmund Freud, pada manusia terdapat daya-daya *eros* dan *tanathos* yang ambiguitas ini ikut menentukan cara manusia merenspons pelbagai perkembangan dalam hidupnya.¹¹

2. Optimalisasi Peranan Semua Stakeholders (Eksekutif, Legislatif, Judikatif serta Masyarakat) dalam Membangun Kota Manado yang Berbudaya, Tertib, Harmonis, Sejahtera, Cerdas serta Beradab (Reformasi)

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk

¹⁰ Novri Susan. 2012:22-23. Negara Gagal Mengolah Konflik. Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia. Pustaka pelajar.

¹¹ Bambang Sugiharto. 2008:301-302. Humanisme dan Humaniora. Relevansinya bagi Pendidikan. Jalasutra.

kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan dan kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita, harus di sebelah luar.¹² Jadi, peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu:

- Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹³

Di Indonesia terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan ketimbang peranan. Gejala tersebut terutama disebabkan adanya kecenderungan kuat untuk lebih mementingkan nilai materialisme daripada spiritualisme. Nilai materialisme di dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan di dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriah tersebut, misalnya, gelar, tempat kediaman mewah, kendaraan, pakaian, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memang diperlukan, akan tetapi bukanlah yang terpenting di dalam pergaulan hidup manusia. Memang perlu diakui, bahwa di Indonesia peranan juga mendapatkan penghargaan tertentu, akan tetapi belum proporsional sifatnya. Padahal menjalankan peranan berarti melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Apabila seorang pegawai negeri, misalnya lebih mementingkan kedudukan daripada peranannya, maka dia akan

¹² Soerjono Soekanto. 2005:243. Sosiologi Suatu Pengantar. Radja Grafindo Persada. Jakarta

¹³ Ibid.p.244.

menuntut agar warga masyarakat lebih banyak melayaninya (padahal, peranan seorang pegawai negeri adalah memberikan pelayanan kepada warga masyarakat). Faktor inilah antara lain yang mengakibatkan terjadinya halangan-halangan di dalam menerapkan birokrasi yang positif.¹⁴

Dalam beberapa tahun terakhir ini, di Indonesia banyak terdengar peringatan dari pemimpin-pemimpin masyarakat tentang munculnya gejala-gejala perilaku sosial baru yang tidak sesuai dengan kultur bangsa, yang jika dibiarkan terus berlarut akan dapat merusak nilai-nilai kultural bangsa Indonesia. Gejala-gejala yang mengkhawatirkan tersebut antara lain adalah kecendrungan kepada pola perilaku konsumerisme, nepotisme, sadistik, agresif, hipokrit, materialistis, individualistis, dan hedonistis. Secara umum, orang-orang menyebut

gejala tersebut sebagai proses penurunan nilai moral dan erosi kultural.¹⁵

“Semangat reformasi masih sangat menggema dalam kuping semua warga bangsa, demikian halnya warga kota Manado. “Mengapa?” Tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang berharap adanya perubahan dalam semua aspek kehidupan sosial. Hentakan reformasi membangunkan harapan baru dari sebuah mimpi yang sudah lama terkubur akibat kekuasaan otoriter represif. Semua orang di negeri ini menyambut dengan sukacita bahkan para pejabat di kota Manado selalu berbuse-buse mengkampanyekan reformasi sebagai era perubahan (mirip zaman pencerahan).

Sayang, euforia reformasi dibayang-bayangi krisis nilai, krisis rasa bangga, krisis rasa memiliki warga kota Manado yang dikenal dengan krisis identitas. Krisis ini diduga sebagai faktor pemicu bertumbuh sikap inkonsistensi dan sikap kompromistis (sulit mendapatkan orang yang patut dipercaya tanpa transaksi). Saat ini ke manapun kita pergi ke setiap sudut kota Manado isu utama setiap perbincangan yakni sekitar ramalan politik (figur Gub/Wagub dan Bupati/Walikota). Pilkada langsung adalah buah dari reformasi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu lahir nada sumbang, mengumpat terhadap reformasi, bahwa telah terjadi bias reformasi, negeri setengah reformasi, reformasi masak karbit, dll.

Perubahan sikap pandang dari antusiasme penuh harapan menjadi pesimistis dipicu oleh kualitas kepribadian dan kecerdasan para pemimpin bangsa ini di semua lini dalam mengakumulasi dan memformulasikan euforia reformasi tersebut. Rakyat berharap para pemimpin Legislatif, Eksekutif, Judikatif di kota

¹⁴ Ibid.p.246-247.

¹⁵ Amri Marzali.2009:184. Antropolgi dan Pembangunan Indonesia. Kencana Prenada Media Group.Jakarta

Manado mampu mengaplikasikan semangat reformasi itu dalam menghargai nilai-nilai kebajikan, yakni: berani menolak praktik nepotisme, koncoisme, keluargaisme, hukum pilih kasih, berpihak pada kebenaran, siap menanggung risiko terhadap setiap keputusan strategis. Misalnya dalam hal memilih dan menggantikan pejabat, harus mengedepankan kualitas, integritas, kapabilitas, profesionalitas ketimbang “kedekatan dan transaksional.”

Gambaran singkat tentang warga kota Manado dalam prespektif Aristoteles bahwa segala sesuatu dapat mengalami proses perubahan karena setiap benda atau obyek atau manusia mengandung dalam dirinya kemungkinan untuk menjadi sesuatu yang lain. Segala sesuatu mengandung kekuatan dinamis yang mengarah kepada “tujuan” tertentu. Ada dari dinamika itu bercorak eksternal dan terarah ke obyek di luar, misalnya kalau manusia membangun sebuah rumah. Akan tetapi ada pula yang bersifat imanen, artinya dinamika itu mempunyai tujuan dalam dirinya sendiri. Aristoteles menyebut “tujuan” yang imanen ini *entelekhy* (segala sesuatu mempunyai dalam dirinya).¹⁶

Di sisi lain, menegaskan bahwa warga kota Manado adalah masyarakat aktif, artinya masyarakat yang menguasai dunia sosial mereka. Dia sangat berbeda dengan masyarakat pasif di mana para anggotanya dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan luar atau kekuatan aktif lainnya. Menurut Etzioni dalam masyarakat aktif orang dapat mengubah hukum-hukum sosial. Di dunia yang demikian manusia adalah pencipta, dapat membentuk masyarakat untuk menanggulangi kebutuhan-kebutuhannya. Orientasi aktif memiliki tiga komponen: kesadaran pribadi, pengetahuan para aktor dan komitmen pada satu atau lebih tujuan yang harus dicapai serta fasilitas kekuasaan untuk mengubah tatanan sosial (Etzioni, 1968:4). Akan tetapi, kegiatan yang demikian bukan tanpa berbagai kendala, sebab setiap aksi melahirkan kontra aksi. Oleh sebab itu, manusia aktif bukan mereka yang semata-mata melakukan segala keinginannya. Untuk bertindak (tepat), manusia yang demikian harus mencari pengetahuan atau informasi. Dia harus bersedia menunda ganjaran (imbalan) pribadi sehubungan dengan realisasi tujuan kemasyarakatan yang lebih sempurna.¹⁷

Emile Durkheim (Jones, 2009:46), berpendapat bahwa masalah sentra eksistensi sosial adalah masalah keteraturan—bagaimana mencapai solidaritas sosial dalam

¹⁶ Jong Ohoitumir. 1997:58. Pengantar Berfilsafat. Yayasan Gapura. Jakarta

¹⁷ Margaret M. Poloma. 2004:355. Sosiologi Kontemporer. Radja Grafindo Persada. Jakarta

masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai tipe yang berbeda dan karenanya jalan kearah solidaritas sosial juga mengalami perbedaan. Dalam suatu masyarakat pra-modern, tradisional, di mana manusia hidup dalam cara yang hampir sama, solidaritas dicapai secara kurang lebih otomatis. Ini sering dikenal sebagai solidaritas mekanik, suatu bentuk solidaritas yang muncul dengan sendirinya sebagai akibat pembagian kerja yang sederhana.

Solidaritas mekanik ini mengalami penurunan dalam suatu masyarakat modern. Ini karena masyarakat modern memiliki pembagian kerja yang sangat kompleks sehingga solidaritas sosial menjadi jauh lebih sulit untuk dicapai. Menurut Durkheim, ini menimbulkan bahaya utama modernitas. Kekuatan yang memisahkan dan membagi-bagi orang begitu besar sehingga disintegrasi sosial menjadi ancaman nyata (Jones,2009:46). Kemudian, jika hal ini dikembalikan pada kepentingan diri sendiri, maka sebenarnya kita anti sosial. Ini karena kita pada dasarnya serakah, egois, kejam dan agresif. Jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan apa yang disebut Durkheim sebagai *anomi*.¹⁸

Oleh karena itu, sebuah nasihat buat pemerintah kota Manado bahwa pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan dampak pada segi sosial dan lingkungan (Salim,2010:84). *Pertama*, pembangunan sosial ditujukan pada pemberantasan kemiskinan struktural di berbagai bidang, seperti ketiadaan akses pendapatan, lapangan kerja, air minum, jasa energi, pemukiman, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain. *Kedua*, pembangunan ekonomi harus mengubah pola produksi dan konsumsi yang tidak menopang keberlanjutan, terutama dalam penggunaan energi yang tidak efisien dan mencemarkan, penggunaan sumber daya alam (hutan, tanah, pantai, dan laut) secara boros. Konsumsi juga perlu diarahkan pada upaya daur ulang bahan kemasan dan hemat minyak karbon. *Ketiga*, penyelamatan dan perlindungan ekosistem serta fungsi hutan dari sumber daya alam agar mampu menopang proses pembangunan berkelanjutan.¹⁹

Selanjutnya, proses pembangunan juga memerlukan sebanyak mungkin orang yang trampil, berkeahlian, berpengetahuan, yang rajin bekerja dan pandai berusaha. Lebih dari itu, kita memerlukan orang yang mempunyai sikap bathin yang kuat dan positif: wawasan luas dan tidak berprasangka, terbuka, tanggap, berani, teguh, bersemangat,

¹⁸ Bidi Winarno. 2002:199-200. Etika Pembangunan. CAPS,Jogyakarta.

¹⁹ Ibid.p.321

berminat untuk belajar terus, bertekad untuk menghasilkan kerja yang bermutu, dapat dipercaya, bersedia berkarya bagi seluruh bangsa dan tidak hanya bagi diri sendiri, jujur, bertanggung jawab. Mereka yang berbakat di antara kita perlu disediakan lingkungan yang kondusif terhadap pengembangan maksimal potensi mereka itu.²⁰

Dalam konteks ini, manusia membutuhkan minimal dua bentuk dukungan supaya ia dapat *survive* dan berkembang: pertama, ia perlu dibantu, sepenuhnya dijamin, dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar karena tanpitu ia tidak dapat mengembangkan diri; dan kedua, ia harus ditunjang dalam otonominya untuk mengembangkan dirinya sendiri, jadi ia tidak boleh dijadikan obyek. Otonom ini dia laksanakan sebagai individu yang secara hakiki sosial, jadi bersama dengan masyarakat, berkat masyarakat, dan demi masyarakat; dan itu dalam keterbukaannya kepada Tuhan, menurut keadaan masing-masing.²¹

Selanjutnya, mengingat manusia itu terlahir dalam keadaan “baik,” sehingga menjadi tugasnya untuk selalu mempertahankan kebaikan tersebut terutama dalam hubungan sosialnya, maka tanggung jawab hakiki dari eksistensinya di dunia meraih nilai-nilai moral menjadi miliknya yang sejati, sehingga ia pantas disebut sebagai manusia. Penerimaan sebuah nilai, erat kaitannya dengan upaya-upaya rasional manusia dalam mencari pembuktian-pembuktian yang meyakinkan dirinya akan kebenarannya, sehingga ia menemukan pegangan hidup yang akan menuntun dirinya menjalani kehidupannya di dunia. Dengan cara demikian, ia pun dapat hidup dengan cara yang baik dan pantas setiap saat. Standar moral manusia banyak ditentukan oleh tingkat perkembangan sosialnya. Moralitas tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia sebagai pembuka lagi kehidupan yang lebih maju ke arah kehidupan yang membahagiakan dan penuh makna. Oleh karena itu, problem moral bukan sekedar masalah moral itu sendiri, tetapi juga menyangkut persoalan sosial, ekonomi dan juga politik.²²

Jelas bukan masyarakat yang menentukan nilai baik atau buruk, susila atau tidak susilanya sesuatu perbuatan, tetapi etika itu sendiri dalam kedudukannya sebagai suatu ilmu. Etika dengan sendirinya mempunyai semacam alat pengukur yang dapat

²⁰ Franz Magnis Suseno. 1992:187. Filsafat Kebudayaan Politik. Butir-butir Pemikiran Kritis. Gramedia Jakarta

²¹ Ibid.p.195

²² Idzam Fautanu. 2012:206-207. Filsafat Ilmu. Teori dan plikasi. Referensi.Jakarta

digunakan untuk menilai, menetapkan atau memutuskan sesuatu perbuatan/tindakan mana yang susila dan mana yang asusila atau tidak susila.²³ Alat penilai tersebut dalam bahasa filsafat disebut: *Consciousness* ini merupakan kesatuan dari totalitas sejumlah sikap kejiwaan, yang terdiri antara lain ialah:

- Kesadaran (terhadap kesanggupan, kekurangan diri sendiri).
- Pertimbangan rasa (sebagai pencerminan dari adanya rasa keadilan, kemanusiaan dan kesehatan pikiran).
- Kedewasaan jiwa (sebagai pencerminan dari kekayaan pengalaman, kemasakan pertimbangan dan sikap kehati-hatian).

Singkatnya, norma etika tidak lain dari suatu norma yang berfungsi mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai moral manusia, supaya dapat dipatuhi oleh anggota masyarakat itu sendiri dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial. Membangun masyarakat dengan sendirinya berarti menata dan menyusunnya supaya lebih baik, membentuk (mentalnya) supaya lebih sadar, lebih maju, misalnya dari masyarakat “malas” menjadi masyarakat dinamis, dan mengisi jiwa itu) kalau perlu mengganti pula isinya dari masyarakat yang serba tergantung menjadi masyarakat yang telah sanggup berdiri sendiri.

KESIMPULAN

Masyarakat kota Manado cinta damai, harmonis, toleran terhadap perbedaan suku, ras dan agama. Sudah teruji, namun harus tetap waspada terhadap jebakan godaan globalisasi dalam rupa-rupa bentuk deviasi, yakni materialisme, hedonisme, individualisme karena tahun-tahun terakhir ini di kota Manado menyimpan beberapa sumber pemicu konflik akar rumput, yakni tawuran antar kampung (tarkam), konflik politik serta konflik keyakinan (perpindahan jemaat/umat).

Masyarakat kota Manado sesungguhnya memiliki nilai-nilai kebajikan sehingga membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dan optimal dari semua *stakeholders* (Eksekutif, Legislatif, Judikatif serta Masyarakat) guna membangun kota Manado yang berbudaya, beretika, tertib, harmonis, sejahtera, cerdas serta beradab (reformasi).

²³ Baharuddin Salam. 2002:108-109. Etika Sosial. Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia. Rineka Cipta. Jakarta

Dengan demikian, mampu menangkal sikap permisif sistemik fandalistik (membiarkan kekerasan dan perusakan) yang ditandai dengan usaha menguasai orang atau kelompok lain (manipulasi kekuasaan) secara berlebihan, dengan cara-cara merusak atau menghancurkan tatanan sosial yang berlaku (deviasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Fautanu, Idzam. 2012. *Filsafat Ilmu. Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Referensi.
- Idrus Muhamad, 2007. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. UII Press.
- Kartono Kartini, 1981. *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Marzali Amrizal. 2009. *Antropolgi dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ohoitumur Jong. 1997. *Pengantar Berfilsafat*. Jakarta: Yayasan Gapura.
- Poloma Margaret M. 2004 *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Raho Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka
- Salam Baharuddin. 2002. *Etika Sosial, Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Santoso, Thomas. 2002. *Teori-teori Kekerasan*. Galia Indonesia. Universitas Kristen Petra
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Radj Grafindo Persada.
- Sugiharto, Bambang. 2008. *Humanisme dan Humaniora. Relevansinya bagi Pendidikan*. Jalsutra.
- Suseno, F.Magnis. 1992:187. *Filsafat Kebudayaan Politik. Butir-butir Pemikiran Kritis*. Jakarta: Gramedia.
- Susan, Novri. 2012. *Negara Gagal Mengolah Konflik. Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2002. *Etika Pembangunan*. Yogyakarta:CAPS.